

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Konteks Penelitian

Kebijakan Publik menjadi salah satu komponen penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan suatu negara. Pemerintah bertanggung jawab dalam menghasilkan atau mengeluarkan kebijakan yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapinya. Proses kebijakan publik berbentuk implementasi program atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Namun, seringkali proses implementasi kebijakan tersebut mengalami distorsi, sehingga kebijakan tersebut tidak memberikan hasil yang diharapkan. Oleh karena itu, diperlukan model implementasi kebijakan publik yang terencana dan berkesinambungan, yang terdiri dari input, proses, dan output yang terintegrasi. Dengan demikian, kebijakan publik dapat memberikan dampak yang positif bagi pembangunan suatu negara.

Implementasi kebijakan publik merupakan sebuah kajian administratif yang kompleks. Permasalahan publik yang dihadapi oleh pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakannya mempengaruhi perkembangan proses implementasi kebijakan publik. Banyak masalah implementasi kebijakan yang belum efektif karena para implementer kebijakan belum mampu mengaktualisasikan kebijakan tersebut secara efektif. Menurut **Mulyadi (2015:26)** yang menyatakan bahwa : “Implementasi suatu kebijakan pada dasarnya adalah suatu perubahan atau transformasi yang bersifat multiorganisasi, dimana perubahan yang diterapkan melalui strategi implementasi kebijakan ini mengaitkan berbagai

lapisan masyarakat”. Pengertian tersebut bahwa suatu kebijakan mampu merubah atau mentransformasikan suatu hal di dalam publik dengan dilakukannya implementasi kebijakan oleh multiorganisasi (pemangku kebijakan) dengan menerapkan hasil keputusan dari kebijakan yang dibuat kemudian diimplementasikan melalui strategi-strategi yang dibuat terhadap berbagai permasalahan yang ada pada masyarakat. Melalui judul yang saya angkat berkenaan dengan implementasi kebijakan yang mengacu pada Kebijakan Program Perlindungan Sosial Bencana (PPSB) yang menjadi salah satu program dari Dinas Sosial Kota Bandung dalam upaya mensejahterakan kehidupan masyarakat khususnya yang terkena dampak dari bencana sosial di Kota Bandung.

Kebijakan Program Perlindungan Sosial Bencana (PPSB) merupakan salah satu kebijakan yang diterapkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung untuk memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat yang terdampak bencana. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh bencana alam terhadap masyarakat, serta untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana agar dapat kembali ke keadaan normal setelah terjadi bencana. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menjadi landasan hukum dalam mengimplementasikan Kebijakan Program Perlindungan Sosial Bencana (PPSB) sebagai salah satu solusi untuk mewedahi permasalahan bencana yang terjadi dan kepada warga yang terdampak dari bencana sosial untuk dapat diberikan bantuan yang mampu menyelesaikan semuanya.

Program Kebijakan Perlindungan Bencana Sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Bandung mengacu pada Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor

08 Tahun 2016 sebagai payung hukum program yang dibuat dan dilaksanakan untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada korban bencana sosial, Perlindungan dan bencana merupakan dua fenomena yang saling bertentangan, karena yang pertama bermakna positif sedangkan yang kedua bermakna negatif. Namun, kedua istilah ini selalu terkait, karena dalam setiap bencana akan muncul kemungkinan untuk memberikan perlindungan, dan sebaliknya, dalam setiap perlindungan akan ada kemungkinan terjadinya bencana. Ketika bencana menjadi ancaman serius, orang mulai sadar bahwa investasi pembangunan dapat hilang karena bencana dapat menghancurkan seluruh proses dan hasil pembangunan yang telah dilakukan.

Selain itu, kebijakan program perlindungan bencana ini merupakan salah satu bentuk pelayanan perlindungan sosial bencana yang saat ini menjadi perhatian masyarakat. Khususnya masyarakat yang terdampak dari bencana yang dialaminya, seperti halnya kota Bandung, Kota Bandung merupakan salah satu kota di Indonesia yang sering terkena bencana alam. Bencana alam yang sering terjadi di Kota Bandung antara lain banjir, kekeringan, tanah longsor, dan gempa bumi. Bencana alam tersebut dapat menimbulkan kerugian material dan korban jiwa serta menimbulkan dampak yang luas bagi masyarakat yang terdampak. Kebencanaan di Kota Bandung juga dapat dipicu oleh faktor manusia, seperti kebakaran hutan dan lahan, serta aktivitas manusia yang tidaksesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah Kota Bandung untuk memiliki kebijakan dan program yang efektif untuk menangani bencana alam di

Kota Bandung dan memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat yang terdampak bencana.

Program perlindungan sosial ini serangkaian kebijakan dan tindakan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Bandung untuk melindungi masyarakat dari risiko sosial, termasuk dalam konteks bencana. Program ini bertujuan untuk mengurangi ketidakadilan sosial, kemiskinan, dan ketidakmampuan sosial yang dapat terjadi akibat bencana alam atau situasi krisis lainnya.

Kebijakan program perlindungan sosial bencana dapat membantu masyarakat yang terdampak bencana untuk bangkit kembali dan memulai hidup baru dengan lebih baik. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan organisasi kemanusiaan untuk memperhatikan dan melaksanakan program-program perlindungan sosial bencana ini dengan baik.

Masyarakat yang terdampak bencana alam membutuhkan perlindungan sosial agar dapat *survive* dan kembali ke keadaan normal setelah terjadi bencana. Perlindungan sosial yang diberikan oleh pemerintah dapat berupa bantuan keuangan, bantuan pangan, bantuan pengungsian, dan lainnya. Perlindungan sosial juga dapat berupa pelatihan dan penyediaan modal bagi masyarakat yang terdampak bencana agar dapat kembali menjalankan aktivitas ekonomi mereka. Selain itu, masyarakat yang terdampak bencana juga membutuhkan akses terhadap informasi yang akurat dan terkini mengenai kondisi bencana yang terjadi, serta informasi tentang bantuan yang tersedia.

Masyarakat juga membutuhkan akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas serta pelayanan darurat lainnya yang diperlukan setelah terjadi bencana. Teori yang digunakan penulis terhadap Implementasi Program Perlindungan Sosial Bencana di Dinas Sosial Kota Bandung ialah **Hogwood (1984)** yang memiliki tiga aspek diantaranya : Struktur, Proses, dan Hasil.

Melalui ketiga aspek pada teori tersebut dirasa peneliti mampu mengatasi permasalahan yang terjadi terhadap Kebijakan Program Perlindungan Sosial Bencana (PPSB) yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Bandung, peneliti menemukan terkait penataan masalah terhadap program tersebut ialah adanya permasalahan terkait anggaran dalam penerapan program perlindungan sosial bencana tersebut.

seharusnya demi menunjang pelaksanaan program yang dapat mengatasi persoalan sosial bencana ini anggaran menjadi hal yang sangat krusial dan urgensial, karena kedudukan dan posisinya menjadi sumber daya yang mampu menyelesaikan dan memberikan solusi terhadap masyarakat yang terkena dampak dari bencana sosial yang terjadi di Kota Bandung. Adapun Penjelasan mengenai masalah yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kota Bandung diantaranya:

- 1) Masalah yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kota Bandung terkait dengan kurangnya Instansi-Instansi yang terlibat dan anggaran dalam mengimplementasikan Program perlindungan sosial bencana di Kota Bandung sangat berkaitan dengan Dimensi Struktur. Dimensi struktural mencakup organisasi, prosedur, dan sumber daya yang diperlukan untuk

mengeksekusi kebijakan. Keterbatasan sumber daya dan anggaran yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kota Bandung dapat mempengaruhi struktur organisasi dan sistem yang digunakan dalam mengimplementasikan Program perlindungan sosial bencana, sehingga dapat mempengaruhi efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program sosial bencana serta kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat yang terkena dampak bencana. Oleh karena itu, masalah ini dapat dikaitkan dengan dimensi struktur dalam implementasi Program Perlindungan sosial bencana di Kota Bandung

- 2) Yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kota Bandung dalam kurangnya Partisipasi Masyarakat dan integrasi antara seluruh Kecamatan di Kota Bandung dalam pelaksanaan dan sosialisasi Program Perlindungan sosial bencana sangat berkaitan dengan dimensi proses. Dimensi proses mencakup proses pelaksanaan, prosedur, koordinasi, dan komunikasi yang dilakukan dalam mengimplementasikan kebijakan. Kurangnya koordinasi dan komunikasi antara Dinas Sosial Kota Bandung dengan seluruh Kecamatan di Kota Bandung dapat mempengaruhi proses pelaksanaan program kebijakan sosial bencana yang efektif dan efisien, serta mempengaruhi kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat yang terkena dampak bencana. Oleh karena itu, masalah ini dapat dikaitkan dengan dimensi proses dalam implementasi Program Perlindungan sosial bencana di Kota Bandung..

3) Masalah yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kota Bandung dalam Pencapaian Kebijakan dan Dampak Dari Kebijakan dapat dikaitkan dengan dimensi hasil. Dimensi hasil mencakup hasil akhir atau output yang dihasilkan dari pelaksanaan kebijakan atau program. Dalam konteks ini, kurangnya Pencapaian dan Dampak Dari Kebijakan dapat mempengaruhi *output* dari program Perlindungan sosial bencana yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Hasil atau *output* yang diharapkan dari program kebijakan sosial bencana adalah optimalisasi pelayanan dan perlindungan sosial kepada masyarakat yang terkena dampak bencana. Namun, jika sumber daya dan komunikasi yang kurang mencukupi, maka output yang dihasilkan belum sepenuhnya tersalurkan secara optimal kepada sasaran atau target yang dituju. Oleh karena itu, masalah ini dapat dikaitkan dengan dimensi hasil dalam implementasi Program Perlindungan Sosial bencana di Kota Bandung.

Kebijakan PPSB oleh Dinas Sosial Kota Bandung ini merupakan bagian dari kebijakan nasional yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia dalam menangani bencana alam. Kebijakan ini menjadi penting untuk diterapkan agar masyarakat yang terdampak bencana dapat mendapatkan bantuan yang cukup untuk membantu mereka kembali membangun kehidupan yang terganggu oleh bencana.

Permasalahan dalam implementasi kebijakan PPSB di Kota Bandung dapat berupa masalah pada proses pelaksanaan terhadap program tersebut ialah adanya permasalahan terkait anggaran dalam penerapan program perlindungan sosial bencana tersebut, seharusnya demi menunjang pelaksanaan program yang

dapat mengatasi persoalan sosial bencana ini anggaran menjadi salah satu sumber daya yang sangat penting, karena mampu menyelesaikan dan memberikan solusi terhadap masyarakat yang terkena dampak dari bencana sosial melalui bantuan kepada warga yang mengalami dampak bencana sosial yang terjadi di Kota Bandung. dalam perencanaan dan pengalokasian anggaran.

Selain itu juga kurangnya koordinasi dan sinergi antar instansi terkait, serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam penanganan bencana. Selain itu, masalah lain yang dihadapi dalam implementasi kebijakan PPSB adalah adanya hambatan dalam pemetaan risiko bencana, sehingga ini mengacu pada kurangnya sistem pelaporan dan monitoring, serta belum seluruhnya terintegrasi sistem pelayanan bencana di tingkat kecamatan. Maka dari itu perlu adanya sinergitas antar instansi baik kecamatan dan Dinas Sosial dalam rangka mensinkronisasikan dan menyatukan visi untuk dapat mengimplementasikan Kebijakan Program Perlindungan Sosial Bencana di Kota Bandung secara efektif dan efisien.

Berdasarkan teori yang penulis gunakan terdapat pada aspek kedua yaitu proses, maka dari itu masalah yang muncul terhadap Implementasi Kebijakan Program Perlindungan Sosial Bencana ialah proses yang masih belum sepenuhnya terlaksanakan dengan optimal, baik proses sumber daya yang berkenaan dengan anggaran yang belum tercukupi, kemudian koordinasi yang kurang terintegrasi antar instansi meliputi Kecamatan di Kota Bandung dan Dinas Sosial, kemudian partisipasi masyarakat yang masih minim akan informasi terhadap kebijakan program perlindungan sosial bencana di Kota Bandung

1.2. Fokus Penelitian dan Perumusan Masalah

Fokus penelitian merupakan pemusatan konsentrasi terhadap tujuan penelitian yang sedang dilakukan guna membatasi studi yang diteliti. Fokus penelitian bersifat tentatif sesuai dengan berlangsungnya penelitian.

Maka peneliti memfokuskan penelitian ini pada Implementasi Program Perlindungan sosial bencana (PPSB) oleh Dinas Sosial Kota Bandung

1.2.1. Rumusan Masalah

Bagaimana Implementasi Kebijakan Tentang Program Perlindungan Sosial Bencana (PSBB) oleh Dinas Sosial Kota Bandung?

1.3. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Tentang Program Perlindungan Sosial Bencana (PPSB) oleh Dinas Sosial Kota Bandung

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil laporan Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini diharapkan dapat memberikan masukan sekaligus membantu Dinas Sosial terhadap permasalahan Perlindungan Bencana di Kota Bandung sehingga peneliti memiliki pengetahuan dan ikut serta dan berpartisipasi dalam mewujudkan Kota Bandung yang Aman di tiap wilayahnya dengan mendorong para masyarakat khususnya dengan dapat berperan aktif dan bersinergi antara lapisan masyarakat di tingkat desa/kecamatan dengan Dinas Sosial Kota Bandung.

1.3.1. Kegunaan Teoritis

Hasil laporan Penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan masukan bagi pemerintah kota lain yang sedang mengimplementasikan kebijakan program Perlindungan Sosial Bencana di daerahnya masing-masing. Dengan demikian, diharapkan dapat memberikan solusi terbaik bagi masyarakat yang terdampak bencana agar dapat segera pulih dan memperoleh kembali kesejahteraan yang telah hilang akibat bencana tersebut. Selain itu, diharapkan juga dapat memberikan informasi penting bagi masyarakat mengenai pentingnya perlindungan sosial bencana sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan bencana di masa mendatang.

1.3.2. Kegunaan Praktis

Diharapkan dapat menambahkan pengetahuan dan tambahan referensi serta memberikan masukan atau kritisi dari laporan skripsi ini terhadap formulasi kebijakan yang dirancang kemudian diimplementasikan oleh Dinas Sosial Kota Bandung sebagai sebuah solusi dalam mengatasi permasalahan Bencana dengan mewujudkan program Perlindungan Sosial Bencana (PPSB) dan juga diharapkan dapat membantu masyarakat dalam menghadapi bencana dan meminimalkan kerugian yang dialami. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi kebijakan ini sangat penting bagi kelangsungan hidup masyarakat yang terdampak bencana.

1.3.3. Kegunaan Peneliti

Hasil laporan Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini diharapkan dapat memberikan masukan sekaligus membantu Dinas Sosial terhadap permasalahan Perlindungan Bencana di Kota Bandung sehingga peneliti memiliki pengetahuan dan ikut serta dan berpartisipasi dalam mewujudkan Kota Bandung yang Aman di tiap wilayahnya dengan mendorong para masyarakat khususnya dengan dapat berperan aktif dan bersinergi antara lapisan masyarakat di tingkat desa/kecamatan dengan Dinas Sosial Kota Bandung.